



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.289, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Alokasi Kurang Bayar. Dana Bagi Hasil. Minyak Bumi dan Gas Bumi.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121 /PMK.07/2010

TENTANG

**ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA
ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN
ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
 3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.7/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.7/2010;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.07/2008;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.07/2008;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal terdapat adanya kurang bayar atas penyaluran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi tersebut dialokasikan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

- (1) Alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi merupakan selisih antara DBH SDA Pertambangan minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan realisasi dengan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang telah disalurkan pada tahun berjalan.
- (2) Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp10.128.062.157.004,00 (sepuluh triliun seratus dua puluh delapan miliar enam puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu empat rupiah).
- (3) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 telah disalurkan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) kepada daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008.
- (4) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, alokasi kurang

bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 telah disalurkan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) kepada daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008.

- (5) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tambahan alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp4.128.062.157.004,00 (empat triliun seratus dua puluh delapan miliar enam puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp2.306.523.016.973,00 (dua triliun tiga ratus enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - b. Alokasi DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp1.821.539.140.031,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu tiga puluh satu rupiah).

Pasal 3

- (1) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 termasuk dalam bagian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010.
- (2) Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2010.

- (2) Tata cara penyaluran Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 121/PMK.07/2010 TENTANG
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI
HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN, MINYAK BUMI DAN GAS
BUMI TAHUN ANGGARAN 2008

**ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2008**

No.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	MINYAK BUMI	GAS BUMI	JUMLAH
1	2	3	4	5
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	45,392,910,127	181,056,928,598	226,449,838,725
	Provinsi	40,945,207,719	117,429,768,709	158,374,976,428
	- Bagian Provinsi	1,111,925,606	15,906,789,970	17,018,715,576
	- Tambahan Dalam Rangka Otsus	39,833,282,113	101,522,978,739	141,356,260,852
1	Kab. Aceh Barat	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
2	Kab. Aceh Besar	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
3	Kab. Aceh Selatan	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
4	Kab. Aceh Singkil	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
5	Kab. Aceh Tengah	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
6	Kab. Aceh Tenggara	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
7	Kab. Aceh Timur	105,471,463	1,355,280,797	1,460,752,260
8	Kab. Aceh Utara	1,701,308,479	31,976,647,814	33,677,956,293
9	Kab. Bireuen	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
10	Kab. Aceh Pidie	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
11	Kab. Simeuleu	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
12	Kota Banda Aceh	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
13	Kota Sabang	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
14	Kota Langsa	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
15	Kota Lhoksumawe	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
16	Kab. Nagan Raya	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961

17	Kab. Aceh Jaya	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
18	Kab. Aceh Barat Daya	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
19	Kab. Aceh Gayo Lues	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
20	Kab. Aceh Tamiang	619,239,564	1,373,794,958	1,993,034,522
21	Kab. Bener Meriah	101,084,145	1,446,071,816	1,547,155,961
22	Kab. Pidie Jaya	101,084,146	1,446,071,816	1,547,155,962
23	Kota Subulussalam	101,084,146	1,446,071,816	1,547,155,962
II	SUMATERA UTARA	417,375,913	-	417,375,913
	Provinsi	83,475,180	-	83,475,180
1	Kab. Asahan	6,678,015	-	6,678,015
2	Kab. Dairi	6,678,015	-	6,678,015
3	Kab. Deli Serdang	6,615,339	-	6,615,339
4	Kab. Tanah Karo	6,678,015	-	6,678,015
5	Kab. Labuhan Batu	6,678,015	-	6,678,015
6	Kab. Langkat	140,695,633	-	140,695,633
7	Kab. Mandailing Natal	6,678,015	-	6,678,015
8	Kab. Nias	6,678,015	-	6,678,015
9	Kab. Simalungun	6,678,015	-	6,678,015
10	Kab. Tapanuli Selatan	6,678,015	-	6,678,015
11	Kab. Tapanuli Tengah	6,678,015	-	6,678,015
12	Kab. Tapanuli Utara	6,678,015	-	6,678,015
13	Kab. Toba Samosir	6,678,015	-	6,678,015
14	Kota Binjai	32,995,416	-	32,995,416
15	Kota Medan	6,678,015	-	6,678,015
16	Kota Pematang Siantar	6,678,015	-	6,678,015
17	Kota Sibolga	6,678,015	-	6,678,015
18	Kota Tanjung Balai	6,678,015	-	6,678,015
19	Kota Tebing Tinggi	6,678,015	-	6,678,015
20	Kota Padang Sidempuan	6,678,015	-	6,678,015
21	Kab. Pakpak Bharat	6,678,015	-	6,678,015
22	Kab. Nias Selatan	6,678,015	-	6,678,015
23	Kab. Humbang Hasudutan	6,678,015	-	6,678,015

24	Kab. Serdang Berdagai	6,678,015	-	6,678,015
25	Kab. Samosir	6,678,015	-	6,678,015
26	Kab. Batu Bara	6,678,015	-	6,678,015
III	RIAU	1,084,639,667,248	-	1,084,639,667,248
	Provinsi	216,927,933,450	-	216,927,933,450
1	Kab. Bengkalis	207,626,048,716	-	207,626,048,716
2	Kab. Indragiri Hilir	43,385,586,689	-	43,385,586,689
3	Kab. Indragiri Hulu	43,839,473,001	-	43,839,473,001
4	Kab. Kampar	91,198,824,134	-	91,198,824,134
5	Kab. Kuantan Singingi	43,385,586,689	-	43,385,586,689
6	Kab. Pelalawan	44,281,328,155	-	44,281,328,155
7	Kab. Rokan Hilir	123,718,848,126	-	123,718,848,126
8	Kab. Rokan Hulu	45,009,848,133	-	45,009,848,133
9	Kab. Siak	138,428,396,747	-	138,428,396,747
10	Kota Dumai	43,385,586,690	-	43,385,586,690
11	Kota Pekanbaru	43,452,206,718	-	43,452,206,718
IV	RIAU KEPULAUAN	444,125,845,389	237,509,885,831	681,635,731,220
	Provinsi	92,739,192,088	63,424,553,002	156,163,745,090
1	Kab. Bintan	36,510,460,018	22,648,938,449	59,159,398,467
2	Kab. Natuna	168,834,353,211	60,840,640,584	229,674,993,795
3	Kab. Karimun	36,510,460,018	22,648,938,449	59,159,398,467
4	Kota Batam	36,510,460,018	22,648,938,449	59,159,398,467
5	Kota Tanjung Pinang	36,510,460,018	22,648,938,449	59,159,398,467
6	Kab. Lingga	36,510,460,018	22,648,938,449	59,159,398,467
V	JAMBI	82,705,953,708	71,656,317,179	154,362,270,887
	Provinsi	17,012,038,067	14,584,300,211	31,596,338,278
1	Kab. Batanghari	3,307,131,062	2,773,358,476	6,080,489,538
2	Kab. Bungo	3,780,453,059	3,240,955,661	7,021,408,720
3	Kab. Kerinci	3,780,453,059	3,240,955,661	7,021,408,720

4	Kab. Merangin	3,780,453,059	3,240,955,661	7,021,408,720
5	Kab. Muaro Jambi	4,597,593,932	2,548,999,037	7,146,592,969
6	Kab. Sarolangun	3,603,522,431	2,386,867,407	5,990,389,838
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	24,182,956,620	22,639,800,097	46,822,756,717
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	10,611,402,470	10,974,464,955	21,585,867,425
9	Kab. Tebo	3,699,297,728	3,203,863,410	6,903,161,138
10	Kota Jambi	4,350,652,221	2,821,796,603	7,172,448,824
VI	SUMATERA SELATAN	182,205,005,204	302,402,874,650	484,607,879,854
	Provinsi	36,952,457,992	59,209,266,534	96,161,724,526
1	Kab. Lahat	6,492,400,816	8,604,736,463	15,097,137,279
2	Kab. Musi Banyuasin	54,961,072,631	113,056,465,624	168,017,538,255
3	Kab. Musi Rawas	11,908,275,401	30,711,893,450	42,620,168,851
4	Kab. Muara Enim	8,807,135,390	3,972,621,379	12,779,756,769
5	Kab. Ogan Komering Ilir	5,278,922,604	8,458,466,750	13,737,389,354
6	Kab. Ogan Komering Ulu	7,669,163,924	6,499,896,563	14,169,060,487
7	Kota Palembang	5,278,922,604	8,458,466,750	13,737,389,354
8	Kota Pagar Alam	5,278,922,604	8,458,466,750	13,737,389,354
9	Kota Lubuk Linggau	5,278,922,604	8,458,466,750	13,737,389,354
10	Kota Prabumulih	5,452,329,477	6,701,861,047	12,154,190,524
11	Kab. Banyuasin	7,518,252,505	6,363,921,354	13,882,173,859
12	Kab. Ogan Ilir	5,491,458,840	8,072,944,986	13,564,403,826
13	Kab. Oku Timur	5,278,922,604	8,458,466,750	13,737,389,354
14	Kab. Oku Selatan	5,278,922,604	8,458,466,750	13,737,389,354
15	Kab. Empat Lawang	5,278,922,604	8,458,466,750	13,737,389,354
VII	BANGKA BELITUNG	4,738,735,086	-	4,738,735,086
	Provinsi	1,579,577,721	-	1,579,577,721
1	Kab. Bangka	451,308,195	-	451,308,195
2	Kab. Belitung	451,308,195	-	451,308,195
3	Kota Pangkal Pinang	451,308,195	-	451,308,195
4	Kab. Bangka Selatan	451,308,195	-	451,308,195
5	Kab. Bangka Tengah	451,308,195	-	451,308,195

6	Kab. Bangka Barat	451,308,195	-	451,308,195
7	Kab. Belitung Timur	451,308,195	-	451,308,195
VIII	LAMPUNG	41,386,814,032	-	41,386,814,032
	Provinsi	12,100,859,435	-	12,100,859,435
1	Kab. Lampung Barat	2,476,663,427	-	2,476,663,427
2	Kab. Lampung Selatan	2,476,663,427	-	2,476,663,427
3	Kab. Lampung Tengah	2,476,663,427	-	2,476,663,427
4	Kab. Lampung Utara	2,476,663,427	-	2,476,663,427
5	Kab. Lampung Timur	6,995,983,754	-	6,995,983,754
6	Kab. Tanggamus	2,476,663,427	-	2,476,663,427
7	Kab. Tulang Bawang	2,476,663,427	-	2,476,663,427
8	Kab. Way Kanan	2,476,663,427	-	2,476,663,427
9	Kota Bandar Lampung	2,476,663,427	-	2,476,663,427
10	Kota Metro	2,476,663,427	-	2,476,663,427
IX	DKI JAKARTA	7,740,597,639	-	7,740,597,639
X	JAWA BARAT	28,784,204,135	-	28,784,204,135
	Provinsi	8,186,067,504	-	8,186,067,504
1	Kab. Bandung	636,169,111	-	636,169,111
2	Kab. Bekasi	3,392,873,613	-	3,392,873,613
3	Kab. Bogor	636,169,111	-	636,169,111
4	Kab. Ciamis	636,169,111	-	636,169,111
5	Kab. Cianjur	636,169,111	-	636,169,111
6	Kab. Cirebon	636,169,111	-	636,169,111
7	Kab. Garut	636,169,111	-	636,169,111
8	Kab. Indramayu	1,579,412,711	-	1,579,412,711
9	Kab. Karawang	883,918,845	-	883,918,845
10	Kab. Kuningan	636,169,111	-	636,169,111
11	Kab. Majalengka	680,503,926	-	680,503,926
12	Kab. Purwakarta	636,169,111	-	636,169,111

13	Kab. Subang	701,876,205	-	701,876,205
14	Kab. Sukabumi	636,169,111	-	636,169,111
15	Kab. Sumedang	636,169,111	-	636,169,111
16	Kab. Tasikmalaya	636,169,111	-	636,169,111
17	Kota Bandung	636,169,111	-	636,169,111
18	Kota Bekasi	636,169,111	-	636,169,111
19	Kota Bogor	636,169,111	-	636,169,111
20	Kota Cirebon	636,169,111	-	636,169,111
21	Kota Depok	636,169,111	-	636,169,111
22	Kota Sukabumi	636,169,111	-	636,169,111
23	Kota Cimahi	636,169,111	-	636,169,111
24	Kota Tasikmalaya	636,169,111	-	636,169,111
25	Kota Banjar	636,169,111	-	636,169,111
26	Kab. Bandung Barat	636,169,111	-	636,169,111
XI	JAWA TENGAH	421,512,932	-	421,512,932
	Provinsi	84,302,583	-	84,302,583
1	Kab. Banjarnegara	4,958,976	-	4,958,976
2	Kab. Banyumas	4,958,976	-	4,958,976
3	Kab. Batang	4,958,976	-	4,958,976
4	Kab. Blora	168,581,939	-	168,581,939
5	Kab. Boyolali	4,958,976	-	4,958,976
6	Kab. Brebes	4,958,976	-	4,958,976
7	Kab. Cilacap	4,958,976	-	4,958,976
8	Kab. Demak	4,958,976	-	4,958,976
9	Kab. Grobogan	4,982,202	-	4,982,202
10	Kab. Jepara	4,958,976	-	4,958,976
11	Kab. Karanganyar	4,958,976	-	4,958,976
12	Kab. Kebumen	4,958,976	-	4,958,976
13	Kab. Kendal	4,958,976	-	4,958,976
14	Kab. Klaten	4,958,976	-	4,958,976
15	Kab. Kudus	4,958,976	-	4,958,976
16	Kab. Magelang	4,958,976	-	4,958,976

17	Kab. Pati	4,958,976	-	4,958,976
18	Kab. Pekalongan	4,958,976	-	4,958,976
19	Kab. Pemasang	4,958,976	-	4,958,976
20	Kab. Purbalingga	4,958,976	-	4,958,976
21	Kab. Purworejo	4,958,976	-	4,958,976
22	Kab. Rembang	4,958,976	-	4,958,976
23	Kab. Semarang	4,958,976	-	4,958,976
24	Kab. Sragen	4,958,976	-	4,958,976
25	Kab. Sukoharjo	4,958,976	-	4,958,976
26	Kab. Tegal	4,958,976	-	4,958,976
27	Kab. Temanggung	4,958,976	-	4,958,976
28	Kab. Wonogiri	4,958,976	-	4,958,976
29	Kab. Wonosobo	4,958,976	-	4,958,976
30	Kota Magelang	4,958,976	-	4,958,976
31	Kota Pekalongan	4,958,976	-	4,958,976
32	Kota Salatiga	4,958,976	-	4,958,976
33	Kota Semarang	4,958,976	-	4,958,976
34	Kota Surakarta	4,958,976	-	4,958,976
35	Kota Tegal	4,958,976	-	4,958,976
XII	JAWA TIMUR	29,990,426,323	-	29,990,426,323
	Provinsi	6,755,549,946	-	6,755,549,946
1	Kab. Bangkalan	67,810,489	-	67,810,489
2	Kab. Banyuwangi	364,003,229	-	364,003,229
3	Kab. Blitar	364,003,229	-	364,003,229
4	Kab. Bojonegoro	8,304,385,973	-	8,304,385,973
5	Kab. Bondowoso	364,003,229	-	364,003,229
6	Kab. Gresik	559,336,346	-	559,336,346
7	Kab. Jember	364,003,229	-	364,003,229
8	Kab. Jombang	364,003,229	-	364,003,229
9	Kab. Kediri	364,003,229	-	364,003,229
10	Kab. Lamongan	364,003,229	-	364,003,229
11	Kab. Lumajang	364,003,229	-	364,003,229

12	Kab. Madiun	364,003,229	-	364,003,229
13	Kab. Magetan	364,003,229	-	364,003,229
14	Kab. Malang	364,003,229	-	364,003,229
15	Kab. Mojokerto	364,003,229	-	364,003,229
16	Kab. Nganjuk	364,003,229	-	364,003,229
17	Kab. Ngawi	364,003,229	-	364,003,229
18	Kab. Pacitan	364,003,229	-	364,003,229
19	Kab. Pamekasan	364,003,229	-	364,003,229
20	Kab. Pasuruan	364,003,229	-	364,003,229
21	Kab. Ponorogo	364,003,229	-	364,003,229
22	Kab. Probolinggo	364,003,229	-	364,003,229
23	Kab. Sampang	364,003,229	-	364,003,229
24	Kab. Sidoarjo	364,003,231	-	364,003,231
25	Kab. Situbondo	364,003,229	-	364,003,229
26	Kab. Sumenep	269,620,542	-	269,620,542
27	Kab. Trenggalek	364,003,229	-	364,003,229
28	Kab. Tuban	2,021,616,468	-	2,021,616,468
29	Kab. Tulungagung	364,003,229	-	364,003,229
30	Kota Blitar	364,003,229	-	364,003,229
31	Kota Kediri	364,003,229	-	364,003,229
32	Kota Madiun	364,003,229	-	364,003,229
33	Kota Malang	364,003,229	-	364,003,229
34	Kota Mojokerto	364,003,229	-	364,003,229
35	Kota Pasuruan	364,003,229	-	364,003,229
36	Kota Probolinggo	364,003,229	-	364,003,229
37	Kota Surabaya	364,003,229	-	364,003,229
38	Kota Batu	364,003,229	-	364,003,229
XIII	KALIMANTAN SELATAN	2,534,383,789	-	2,534,383,789
	Provinsi	506,876,759	-	506,876,759
1	Kab. Banjar	84,479,459	-	84,479,459
2	Kab. Barito Kuala	84,479,459	-	84,479,459
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	84,479,459	-	84,479,459

4	Kab. Hulu Sungai Tengah	84,479,459	-	84,479,459
5	Kab. Hulu Sungai Utara	84,479,459	-	84,479,459
6	Kab. Kota Baru	84,479,459	-	84,479,459
7	Kab. Tabalong	956,721,270	-	956,721,270
8	Kab. Tanah Laut	84,479,459	-	84,479,459
9	Kab. Tapin	84,479,459	-	84,479,459
10	Kota Banjar Baru	84,479,459	-	84,479,459
11	Kota Banjarmasin	84,479,459	-	84,479,459
12	Kab. Balangan	141,511,711	-	141,511,711
13	Kab. Tanah Bumbu	84,479,459	-	84,479,459
XIV	KALIMANTAN TIMUR	328,640,925,798	1,028,913,133,773	1,357,554,059,571
	Provinsi	83,645,438,821	257,361,122,546	341,006,561,367
1	Kab. Berau	13,354,495,510	41,188,475,828	54,542,971,338
2	Kab. Bulungan	13,269,081,564	40,087,746,348	53,356,827,912
3	Kab. Kutai Kartanegara	76,964,547,866	278,452,579,444	355,417,127,310
4	Kab. Kutai Barat	13,354,495,510	41,188,475,828	54,542,971,338
5	Kab. Kutai Timur	13,968,949,474	40,871,368,505	54,840,317,979
6	Kab. Malinau	13,354,495,510	41,188,475,828	54,542,971,338
7	Kab. Nunukan	13,536,388,202	40,418,796,890	53,955,185,092
8	Kab. Pasir	13,354,495,513	41,188,475,828	54,542,971,341
9	Kota Balikpapan	13,354,495,513	41,188,475,828	54,542,971,341
10	Kota Bontang	15,637,619,703	40,900,703,420	56,538,323,123
11	Kota Samarinda	13,407,029,563	42,266,058,594	55,673,088,157
12	Kota Tarakan	14,590,871,935	39,570,515,685	54,161,387,620
13	Kab. Penajem Paser Utara	16,848,521,114	43,041,863,201	59,890,384,315
XV	PAPUA BARAT	22,798,659,650	-	22,798,659,650
	Provinsi	4,559,731,932	-	4,559,731,932
1	Kab. Sorong	7,233,661,944	-	7,233,661,944
2	Kab. Manokwari	1,139,932,981	-	1,139,932,981
3	Kab. Fak Fak	1,139,932,981	-	1,139,932,981

4	Kota Sorong	1,139,932,981	-	1,139,932,981
5	Kab. Sorong Selatan	1,139,932,981	-	1,139,932,981
6	Kab. Raja Ampat	3,073,899,460	-	3,073,899,460
7	Kab. Teluk Bintuni	1,091,768,428	-	1,091,768,428
8	Kab. Teluk Wondama	1,139,932,981	-	1,139,932,981
9	Kab. Kaimana	1,139,932,981	-	1,139,932,981
	TOTAL NASIONAL	2,306,523,016,973	1,821,539,140,031	4,128,062,157,004

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO